

## TANTANGAN RAPBN 2025 DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT MENENGAH

Nidya Waras Sayekti<sup>1</sup> & Brigita Diaz Primadita<sup>2</sup>

11

### Abstrak

*Pada penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Presiden Jokowi menyebutkan fokus utama RAPBN 2025 bertumpu pada permintaan domestik. Daya beli masyarakat akan dijaga ketat dengan pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan program bansos dan subsidi. Tulisan ini menganalisis tantangan dari strategi RAPBN 2025 dan dampaknya bagi masyarakat menengah. Strategi dalam RAPBN 2025 terbagi menjadi dua yakni jangka pendek dan jangka menengah dengan berbagai tantangan yang dihadapi, antara lain: kurang memiliki modal kuat untuk memenuhi program belanja ekspansif, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, peningkatan ekspor dan investasi, dan menjaga daya beli masyarakat khususnya kelas menengah di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global dan wacana kenaikan PPN. Komisi XI DPR RI perlu mengawasi guna memastikan eksekusi program-program pemerintah dapat berjalan efisien dengan anggaran optimal. Komisi XI DPR RI juga perlu memastikan agar kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemasukan tidak memberatkan ekonomi masyarakat terutama kelas menengah.*

### Pendahuluan

Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2024. RAPBN 2025 memiliki pagu anggaran belanja senilai Rp3.613,1 triliun, lebih tinggi

8,7% dari belanja negara dalam APBN 2024 (Rp3.325,1 triliun). Di sisi lain, target pendapatan negara 2025 sebesar Rp2.996,9 triliun atau naik 6,9% dari target APBN 2024 (Rp2.802,3 triliun). Kenaikan belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan, menciptakan defisit fiskal Rp616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit



<sup>1</sup> Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [nidya.ws@dpr.go.id](mailto:nidya.ws@dpr.go.id).

<sup>2</sup> Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekkuinbang pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [brigita.primadita@dpr.go.id](mailto:brigita.primadita@dpr.go.id).



anggaran tersebut lebih besar dari APBN 2024 senilai Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB (Nurfida et al., 2024).

Penyusunan RAPBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar: inflasi kisaran 2,5%, pertumbuhan ekonomi 5,2%, nilai tukar rupiah Rp16.100 per Dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di 7,1% (Presiden Republik Indonesia, 2024). RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo tetapi akan dijalankan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan menjadi fondasi transisi pemerintahan, namun tetap memiliki kesempatan penyesuaian melalui APBN Perubahan. Tulisan ini menganalisis tantangan dari strategi RAPBN 2025 karena berada pada periode pemerintahan transisi dan dampaknya pada masyarakat menengah.

### **Tantangan dari Strategi RAPBN 2025**

RAPBN 2025 merupakan bagian dari strategi pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Ada dua strategi kebijakan yakni strategi jangka pendek dan menengah dalam nota keuangan RAPBN 2025 (Presiden Republik Indonesia, 2024). Pada strategi jangka pendek, pemerintah fokus untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah. Strategi jangka pendek dilakukan melalui: 1) Makan Bergizi Gratis (MBG); 2) program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, dan *link and match* pendidikan dengan dunia usaha, serta pembangunan sekolah unggulan; 3) mendorong produktivitas, menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan dengan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi; 4)

meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat; dan 5) peningkatan modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pada strategi jangka menengah, pemerintah berupaya mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada delapan strategi yang direncanakan pemerintah: 1) mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, MBG, renovasi sekolah, kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial; 2) penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi yang rendah emisi dan berorientasi ekspor; 3) meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat; 4) melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas; 5) pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi; 6) peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM; 7) penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi; dan 8) penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan hak asasi manusia.

Strategi dan kebijakan RAPBN 2025 akan menghadapi berbagai tantangan berat karena kurang memiliki modal kuat untuk memenuhi program belanja ekspansif. Pendapatan perpajakan belum ada improvisasi (Elena & Rahardyan, 2024), seperti

belum dieksekusinya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% maksimal per 1 Januari 2025 sesuai UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Selain itu, ada pembayaran utang jatuh tempo Rp800,33 triliun dan bunga Rp552,85 triliun pada 2025.

Tantangan lain yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi karena keduanya memengaruhi konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong laju PDB. Dalam RAPBN 2025, inflasi ditargetkan 2,5%, namun asumsi nilai rupiah sangat tinggi Rp16.100 per dolar AS. Faktanya pergerakan rupiah memiliki sensitivitas terhadap inflasi, utamanya barang impor yang akan menaikkan ongkos produksi, sehingga harga jual di pasaran naik. Pemerintah perlu mengamankan intervensi pasar guna mengantisipasi peningkatan beban terhadap daya beli masyarakat karena pelemahan nilai tukar atau fluktuasi harga komoditas pangan dan energi. Menurut Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, isu pertumbuhan ekonomi 2025 tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan bantalan sosial, namun juga melalui perputaran ekonomi yang lebih *robust* (kuat) di sektor riil. Untuk itu, APBN 2025 harus menciptakan lebih banyak stimulus peningkatan produktivitas sektor riil agar target pertumbuhan dapat dicapai (Fauzan et al., 2024).

Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang diasumsikan Rp16.100 per dolar AS menimbulkan ambiguitas karena merefleksikan sikap pemerintah dalam mengantisipasi gejolak global terutama di pasar keuangan, namun menandakan kepasrahan dalam menjaga stabilitas. Hal ini dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P, asumsi nilai tukar

rupiah tersebut berada di atas level yang telah disepakati Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah pada kisaran Rp15.300-Rp15.900. Padahal asumsi lebih rendah disusun untuk mendorong pemerintah dan otoritas moneter bersinergi mengamankan rupiah di tengah tekanan eksternal. Peluang penguatan rupiah sangat terbuka seiring pelonggaran moneter dan kuatnya optimisme investor (Fauzan et al., 2024).

Selain nilai tukar rupiah dan inflasi, pemerintah juga perlu memerhatikan ekspor dan investasi sebagai komponen penopang PDB. Dalam investasi, pemerintah harus mendorong belanja lebih besar pada proyek infrastruktur serta mendorong masuknya investasi. Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai upaya menguatkan ekspor dan investasi masih menghadapi tantangan, antara lain: sinkronisasi regulasi dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, investasi yang efisien untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, hilirisasi ekspor di luar komoditas sumber daya alam (Fauzan et al., 2024).

Dari faktor eksternal yang masih berat yakni guncangan di pasar keuangan global dan tren *higher for longer* atau suku bunga tinggi di bank sentral negara maju yang merapuhkan rupiah. Jika tidak diantisipasi, ini akan berimbas pada keluarnya modal asing yang menekan rupiah, hingga biaya produksi yang kian mahal karena tingginya nilai tukar dolar AS. Selain itu, perlu diantisipasi juga efek geopolitik yang memengaruhi aktivitas ekspor dan investasi (Fauzan et al., 2024). Kebijakan responsif yang dapat diambil pemerintah yakni fokus pada peningkatan daya saing industri melalui insentif fiskal dan nonfiskal, optimalisasi sektor-sektor strategis yang berorientasi ekspor, dan penguatan daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah melalui bauran kebijakan dan insentif.

## Dampak bagi Masyarakat Menengah

Rencana untuk lebih mengandalkan permintaan domestik merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah baru, melihat daya beli masyarakat kelas menengah yang menurun. Hal ini tercermin dari penurunan indeks keyakinan konsumen selama Mei – Juni 2024 dan kontraksi *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur yang disebabkan salah satunya oleh pelemahan permintaan domestik. Pelemahan ini juga terkonfirmasi oleh perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 tidak setinggi kuartal sebelumnya (Nurdifa et al., 2024)

Tanpa intervensi untuk memperkuat kelas menengah, daya beli masyarakat yang sedang turun itu juga dapat berpengaruh pada target penerimaan perpajakan yang pada RAPBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.490,9 triliun (Theodora, 2024). Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menunjukkan, penduduk kelas menengah turun 8,5 juta orang dari tahun 2018 ke 2023 dari kelompok kelas menengah menjadi kelompok rentan dan calon kelas menengah. Pemerintah mengakui, kelas menengah masih belum mendapat perhatian cukup karena fokus pada penanganan ekonomi masyarakat miskin (20% kelas terbawah). Pemerintah baru melakukan seluruh sektor pelayanan publik seperti pendidikan, air bersih, listrik, internet terjangkau diterima dengan kualitas yang baik (Rachman, 2023). Wacana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 juga akan semakin memberatkan kelas menengah yang dapat menimbulkan sejumlah dampak, di antaranya: mendorong terjadinya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat yang secara jangka panjang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya angka pengangguran.

Untuk meminimalkan dampak tersebut, pemerintah memperluas penerimaan pajak dari sektor lain, seperti pajak karbon serta penerapan sistem *core tax* sehingga pendapatan negara dapat meningkat namun juga tidak membebani masyarakat (Putri, 2024). Opsi meningkatkan penghasilan negara lainnya adalah menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak dan mengurangi fasilitas pengecualian PPN sehingga lebih banyak pengusaha akan membayar PPN namun tetap memerhatikan iklim investasi.

## Penutup

Postur RAPBN 2025 masih dibayangi ketidakpastian kondisi ekonomi global di tengah tensi geopolitik yang belum reda dan resesi di sejumlah negara maju. Pemerintah baru perlu fokus memetakan masalah pokok dan menentukan fokus prioritas ke depan, sehingga rasionalisasi program perlu dilakukan terus menerus. Pemerintahan baru juga perlu cepat tanggap dan adaptif atas berbagai tantangan. Untuk mengakomodasi berbagai program dan kebijakan yang diusung, pemerintah baru harus melakukan penajaman dengan pemetaan program prioritas, pelaksanaan secara bertahap, evaluasi secara intensif dan menyeluruh sehingga APBN dapat dimanfaatkan secara efisien dan akuntabel.

Komisi XI DPR RI perlu melakukan pengawasan guna memastikan eksekusi program-program pemerintah dapat berjalan efisien sehingga program prioritas dapat terlaksana dan penggunaan anggaran dapat optimal. Komisi XI DPR RI juga perlu memastikan agar kebijakan yang diambil pemerintahan baru tidak memberatkan ekonomi masyarakat terutama kelas menengah serta mendorong pembuatan kebijakan khusus untuk penguatan masyarakat kelas menengah.

## Referensi

- Elena, M., & Rahardyan, A. (2024, Agustus 19). Manuver fiskal minim modal. *Bisnis Indonesia*, 7.
- Fauzan, R., Puspa, A.W., & Elena, M. (2024, Agustus 19). Rasionalitas syarat tantangan. *Bisnis Indonesia*, 4.
- Nurdifa, A.R., Simanjuntak, S.D.A., & Kamalina, A.R. (2024, Agustus 19). Risiko mengintai anggaran populis. *Bisnis Indonesia*, 11.
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Pidato Presiden Republik Indonesia Pengantar RAPBN 2025 dan Nota Keuangan*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Putri, I.M. (2024). Kenaikan PPN 12% dan dampaknya terhadap ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 8 (2), 934-944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>
- Rachman, A. (2023, Desember 22). Sri Mulyani akui fokus APBN buat kelas menengah kurang. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231222143558-4-499603/sri-mulyani-akui-fokus-apbn-buat-kelas-menengah-kurang>
- Theodora, A. (2024, Agustus 17). Tanpa penguatan kelas menengah, target ekonomi 2025 sulit dicapai. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/17/tanpa-penguatan-kelas-menengah-target-ekonomi-2025-sulit-dicapai>